

## Parpol Jangan Terjebak, Peluang Masih Terbuka karena Elektabilitas Calon Petahana Belum Tentu Tinggi

10 Agustus 2015 - Pada masa pendaftaran dibuka kembali, partai politik diuji agar tidak terjebak pada praktik transaksional untuk sekadar memunculkan pasangan calon "boneka" kepala daerah agar pemilihan kepala daerah secara serentak tidak ditunda. Alasannya, pada 9 Desember mendatang, elektabilitas calon petahana belum tentu tinggi.

Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, di Jakarta, Minggu (8/8), mengatakan, hasil survei tidak selalu sama dengan kenyataan di lapangan. Di mata masyarakat, elektabilitas calon petahana belum tentu benar-benar kuat saat pemungutan suara 9 Desember mendatang.

Karena itu, pada masa pendaftaran dibuka kembali, dengan calon kepala daerah di tujuh daerah yang calonnya masih kurang dari dua, parpol dapat mengajukan calon alternatif yang tinggi elektabilitasnya. Hari Minggu kemarin hingga Selasa (11/8), pendaftaran dibuka kembali oleh Komisi Pemilihan Umum atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu akibat jumlah pasangan calon yang mendaftar kurang dari dua sekalipun KPU sudah memperpanjangnya.

"Sebenarnya, mengajukan calon boneka itu riskan untuk calon petahana. Kenapa? Karena ada kemungkinan justru dikalahkan calon 'boneka'. Padahal, sebelumnya ia sudah memberikan sejumlah uang tertentu untuk memunculkan calon tersebut," kata Ikrar.

Menurut dia, pemungutan suara memang masih cukup jauh. Namun, dalam waktu tersebut, banyak faktor yang dapat berkontribusi terhadap elektabilitas dan popularitas calon petahana. "Dari hasil survei, calon petahana yang tinggi hanya unggul karena lebih dikenal rakyat yang dipimpinya selama menjabat. Namun, belum tentu petahana tersebut memuaskan masyarakat dan sukses membangun daerah. Ada kemungkinan, mereka hanya kuat karena dikenal saja. Tetapi, lewat kampanye politik yang kreatif, petahana bisa saja dikalahkan calon yang baru," kata Ikrar.

Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif Veri Junaidi mengatakan hal senada. Partai politik semestinya memanfaatkan masa perpanjangan pendaftaran calon dengan menghadirkan kader terbaik. Alternatif pilihan menjadikan bukti bagi parpol yang selama ini mengklaim memiliki kader terbaik.

"Partai kembali dituntut komitmennya, menunjukkan bukti keberhasilan kaderisasinya dengan menyiapkan calon dalam pilkada. Perpanjangan ini memang tak akan menjamin keberanian mengajukan calon alternatif melawan calon tunggal, apalagi kurun waktunya hanya tiga hari," ujarnya. Karena itu, Veri menyarankan perlunya pendekatan politik melibatkan pimpinan partai berkomitmen. Nilai Tawar Tinggi

Fenomena calon "boneka", menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini, bisa saja terjadi. Dengan tidak diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dipastikan tidak hanya calon, tetapi juga partai yang mengusung calon harus berhadapan dengan penawaran yang kerap disebut sewa "perahu".

"Masak calon atau partai yang enggak mau maju mencalonkan dipaksa-paksa maju. Akhirnya, seperti calon tunggal yang berkepentingan menghadirkan calon alternatif agar pilkada jalan," kata Titi Anggraini.

Bahkan, peneliti senior Para Syndicate, Toto Sugiarto, menilai, dalam beberapa hari masa pendaftaran, situasi politik menjadi bergeser. "Bisa jadi, pikiran nakal justru memperlihatkan bahwa di saat parpol dihadapkan pada penilaian publik atas kegagalan kaderisasi, calon merasa memiliki nilai tawar tinggi," tuturnya. Meskipun lobi-lobi politik dari koalisi parpol atau calon tunggal diakui terasa, Ketua Desk Pilkada Partai Kebangkitan Bangsa Bambang Susanto mengatakan, komunikasi politik masih dilakukan untuk pencalonan di Surabaya, Jawa Timur, walaupun masih ada tarik ulur mencari teman koalisi. (Sumber: Kompas)